

# Pemerintah Perkuat Posisi Indonesia dalam Perdagangan Global dengan Percepat Penyelesaian Perjanjian Multilateral



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

**SIARAN PERS**

HM.4.6/248/SET.M.EKON.3/07/2023

## **Pemerintah Perkuat Posisi Indonesia dalam Perdagangan Global dengan Percepat Penyelesaian Perjanjian Multilateral**

**Jakarta, 13 Juli 2023**

Pemerintah akan terus memperjuangkan akses produk Indonesia agar tetap diterima di pasar internasional, seperti pasar Uni Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini akan membantu perdagangan internasional Indonesia yang sedang bangkit lagi setelah selesainya status pandemi Covid-19 di negeri ini. Jikalau jumlah ekspor meningkat, maka cadangan devisa Indonesia pun akan tetap berada di level yang bagus.

Salah satu akan yang akan memajukan perdagangan Indonesia dan negara-negara di Uni Eropa adalah dengan tercapainya kesepakatan dalam Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA).

“Hari ini membahas terkait dengan progres dari perjanjian I-EU CEPA. Tadi kami laporkan bahwa ada 21 isu yang menjadi pembahasan dalam perjanjian itu, yaitu (antara lain) terkait dengan *Trade in Goods*, *State-Owned Enterprises* (BUMN), *Government Procurement*, *Trade and Sustainable Development*, *Investment Court System*, *Rules of Origin*, *Technical Barriers to Trade*, *Anti Fraud Clause*, *Energy and Raw Materials*, *Dispute Settlement*, *Intellectual Property Right*, dan sebagainya,” jelas Menko Airlangga dalam Keterangan Pers di Istana Merdeka usai Rapat Internal bersama Presiden RI terkait Penyelesaian I-EU

CEPA, Tindak Lanjut Pemberlakuan EUDR dan Kerja Sama IPEF, di Jakarta, Kamis (13/07).

Menko Airlangga menerangkan jika pembahasan Indonesia sudah masuk dalam ronde ke-5, perundingan ke-15 yang sedang berlangsung hari ini di Yogyakarta (sampai 14 Juli 2023). “Tadi kami laporkan bahwa isu strategis yang pertama terkait dengan *government procurement* atau pembelian pemerintah. Tentu mereka meminta agar pembelian pemerintah terbuka dan Indonesia mengusulkan akan menyiapkan *positive list*, yang mana barang-barang yang bisa diberikan untuk akses internasional,” terang Menko Airlangga.

Isu selanjutnya terkait dengan *state-owned enterprises* (BUMN). Posisi Indonesia yakni mengungkapkan bahwa ada BUMN yang mendapatkan penugasan khusus, dan ada yang tidak. “(Yang dapat penugasan khusus) itu mereka bisa terima, sedangkan yang tidak mendapatkan penugasan khusus diminta kerja samanya untuk tidak diskriminatif, dan untuk yang bersifat komersial (harus) berdasarkan *business to business*. Ini kita sedang dalam perundingan juga, jadi artinya kita memberikan akses kepada BUMN yang sifatnya komersial,” tutur Menko Airlangga.

Terkait Bea Keluar, menurut Menko Airlangga, posisi Indonesia adalah untuk mengembangkan industri sehingga tidak akan melepaskan hal tersebut. Selain itu, Indonesia juga minta akses terhadap *trade and sustainable development*, terutama untuk produk berwawasan lingkungan. “Nah, di sini Indonesia menekankan pentingnya standarisasi, seperti untuk furnitur atau kayu adalah SVLK, untuk kelapa sawit itu ISPO atau RSPO, jadi kita minta Eropa membuka pasar lebih besar untuk itu,” kata Menko Airlangga.

Mengenai penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), Indonesia memilih cara mekanisme *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) melalui International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) yang bersifat *Ad Hoc* dan mempertimbangkan aspek konsultatif (mediasi). “Diharapkan kalau lima isu ini bisa selesai, maka di akhir tahun ini I-EU CEPA bisa diselesaikan. Tinggal satu perundingan lagi,” imbuh Menko Airlangga.

Perkembangan isu *European Deforestation* (EUDR) juga menjadi salah satu bahasan. Disampaikan Menko Airlangga bahwa perhatian Indonesia tentang regulasi ini yang sudah diundangkan di Uni Eropa. Regulasi EUDR itu akan kena pada tujuh komoditas yaitu sapi, kakao, kopi, kelapa sawit, soya, timber, dan karet. Barang-barang yang masuk Uni Eropa dari komoditas itu diminta memenuhi syarat *deforestation free* yang tergantung kepada undang-undang di negara masing-masing, serta sudah dilakukan *due diligence*.

“Yang paling penting kita ingin agar *implementation guideline*-nya itu mengadopsi apa yang sudah menjadi *best practices*. Persoalan bagi Indonesia juga mengenai *country benchmark*, jadi negara akan diklasifikasikan (menjadi) *high risk*, *standard risk*, atau *low risk*. Nah, pada saat dia jadi *high risk* 8% dari barang ini harus diverifikasi, *standard risk* 6%, sedangkan *low risk* 4%. Hal ini akan sangat mengganggu *smallholder* atau petani kecil yang ada di Indonesia, yang jumlahnya mencapai 15 sampai 17 juta orang. Termasuk juga masalah *geo-location*,” ujar Menko Airlangga.

Terakhir terkait dengan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF), yang perundingannya diharapkan bisa diselesaikan pada November 2023 mendatang. Terdapat 4 pilar dalam IPEF, yakni *trade*, *supply chain*, *clean economy*, dan *fair economy*. “Di dalam perjanjian ini, Indonesia memasukkan mengenai *critical mineral* di pilar pertama, sehingga tentu harapannya produk Indonesia yang berbasis nikel bisa masuk ke pasar Amerika, dan menjadi bagian dari *supply chain* otomotif,” tutup Menko Airlangga. (rep/fsr)

\*\*\*

**Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan**

**Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian**

**Haryo Limanseto**

Website: [www.ekon.go.id](http://www.ekon.go.id)

Twitter, Instagram, Threads, Facebook, TikTok, & YouTube: @PerekonomianRI

Email: [humas@ekon.go.id](mailto:humas@ekon.go.id)

LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia